



Restorasi Tujuan Al Washliyah: Perspektif Sejarah dan Politik

Muhammad Akbar Al Fikri Harahap¹, Hasyimsyah Nasution², Zulkarnain³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Correspondence Email: muhammad0404221002@uinsu.ac.id.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis restorasi tujuan Al Jam'iyatul Washliyah dalam perspektif sejarah dan politik sebagai upaya meneguhkan kembali nilai-nilai dasar organisasi di tengah perubahan sosial, politik, dan perkembangan zaman. Penelitian bertujuan untuk menjelaskan konstruksi tujuan Al Washliyah sejak berdiri pada 30 November 1930, mengidentifikasi faktor sejarah dan politik yang memengaruhi dinamika tujuan organisasi, serta mendeskripsikan pandangan pimpinan, tokoh, senior, alumni, dan kader terhadap proses restorasi tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sejarah dan politik. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorasi tujuan Al Washliyah tidak dimaknai sebagai perubahan terhadap tujuan dasar organisasi, melainkan sebagai proses peneguhan dan aktualisasi kembali nilai-nilai yang dirumuskan para pendiri. Restorasi diwujudkan melalui penguatan identitas organisasi, kaderisasi, pendidikan, dakwah, amal sosial, persatuan umat, serta internalisasi Shibghah, Wijhah, Khittah, dan prinsip Wasathiyah. Dinamika sejarah, perubahan politik, perkembangan sosial, globalisasi, dan kemajuan teknologi mendorong organisasi menyesuaikan strategi perjuangan tanpa mengubah orientasi dasarnya. Temuan ini menegaskan bahwa keberlanjutan Al Washliyah bergantung pada kemampuannya menjaga kesinambungan antara warisan historis dan kebutuhan kontemporer. Penelitian ini berkontribusi pada kajian sejarah organisasi Islam dan pemikiran politik Islam, serta memberikan rekomendasi bagi Al Washliyah untuk memperkuat identitas, arah perjuangan, independensi, dan perannya sebagai organisasi Islam yang moderat, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat serta bangsa. Secara praktis, restorasi tersebut menuntut konsistensi antara tujuan normatif, program organisasi, kualitas kader, dan respons terhadap perubahan politik agar Al Washliyah relevan tanpa kehilangan karakter keislaman serta orientasi kebangsaannya secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *Al Washliyah, Politik, Restorasi, Sejarah, Tujuan Organisasi.*

ABSTRACT

This study analyzes the restoration of Al Jam'iyatul Washliyah's organizational purpose from historical and political perspectives as an effort to reaffirm its foundational values amid social, political, and contemporary change. It aims to explain the construction of Al Washliyah's purpose since its establishment on 30 November 1930, identify historical and political factors influencing its dynamics, and describe the views of leaders, senior members, alumni, and cadres regarding the restoration process. The study employs a qualitative method with historical and political approaches. Data were collected through observation, in-depth interviews, documentation, and literature review, then analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings show that restoring Al Washliyah's purpose is not understood as changing its fundamental objectives, but as reaffirming and reactualizing the values formulated by its

founders. Restoration is manifested through strengthening organizational identity, cadre development, education, da'wah, social welfare activities, Muslim unity, and the internalization of Shibghah, Wijah, Khittah, and Wasathiyah. Historical dynamics, political change, social development, globalization, and technological advancement encourage the organization to adjust its strategies without altering its basic orientation. The findings affirm that Al Washliyah's sustainability depends on maintaining continuity between its historical legacy and contemporary needs. This study contributes to scholarship on Islamic organizational history and Islamic political thought while recommending stronger identity, organizational direction, independence, and a moderate, adaptive role oriented toward the welfare of the Muslim community and nation. Practically, restoration requires consistency between normative objectives, organizational programs, cadre quality, and responses to change so that Al Washliyah remains relevant without losing its Islamic character and national orientation.

Keywords: Al Washliyah, Politics, Restoration, History, Organizational Objectives.

PENDAHULUAN

Organisasi kemasyarakatan Islam memiliki posisi penting dalam perkembangan masyarakat Indonesia karena tidak hanya menjalankan fungsi keagamaan, tetapi juga berperan dalam pendidikan, pembinaan sosial, penguatan moral, kaderisasi, dan pembentukan kesadaran kebangsaan. Organisasi masyarakat sipil juga dapat berkontribusi dalam memperluas akses pendidikan dan mendorong pembangunan sosial melalui kelembagaan yang terorganisasi (Araminta & Dinutanayo, 2025). Dalam konteks tersebut, Al Jam'iyatul Washliyah merupakan salah satu organisasi Islam yang memiliki akar sejarah kuat di Sumatera Utara dan terus mempertahankan eksistensinya melalui jaringan pendidikan, dakwah, dan amal sosial. Organisasi ini berdiri di Medan pada 30 November 1930 dan berkembang dari lingkungan intelektual Maktab Islamiyah Tapanuli yang menjadi ruang pembentukan kader dan ulama pada masa kolonial (Asari & Tanjung, 2019; Nisa & Harahap, 2023).

Kelahiran Al Washliyah tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial-keagamaan dan politik Sumatera Timur pada awal abad ke-20. Perbedaan pandangan antara kelompok Kaum Tua dan Kaum Muda, tekanan kolonialisme, serta kebutuhan membangun persatuan umat menjadi bagian dari konteks yang membentuk organisasi ini. Al Washliyah sejak awal diarahkan sebagai penghubung yang mempertemukan perbedaan sekaligus memperkuat pendidikan, dakwah, dan kepedulian sosial. Para pendirinya juga tumbuh dalam tradisi intelektual Islam yang berinteraksi dengan dinamika kebangsaan dan perlawanan terhadap kolonialisme (Ja'far, 2020; Saragih, 2016). Karena itu, tujuan organisasi tidak hanya memiliki dimensi keagamaan, tetapi juga berkaitan dengan cara Al Washliyah menempatkan dirinya dalam kehidupan umat, masyarakat, dan negara.

Dalam perjalanan sejarahnya, rumusan tujuan Al Washliyah mengalami perkembangan bahasa dan penegasan orientasi. Rumusan awal lebih menonjolkan penyiaran dan penguatan agama Islam, sedangkan rumusan organisasi pada periode kontemporer memasukkan dimensi masyarakat beriman, cerdas, amanah, adil, dan makmur dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 1945. Perkembangan tersebut memperlihatkan adanya proses adaptasi antara identitas awal organisasi dan tuntutan sosial-politik yang berubah. Adaptasi demikian tidak selalu berarti perubahan terhadap tujuan dasar, tetapi dapat menunjukkan penyesuaian cara organisasi mengekspresikan nilai dan orientasinya sesuai konteks sejarah (Nasution, 2022).

Persoalannya adalah sejauh mana perubahan bahasa, program, dan strategi tersebut tetap terhubung dengan cita-cita dasar pendirian Al Washliyah.

Persoalan tersebut menjadi relevan ketika Al Washliyah berkembang menjadi organisasi dengan jaringan kelembagaan yang luas, sementara pada saat yang sama menghadapi tantangan kaderisasi, tata kelola, pendidikan, aset, hubungan dengan negara, perubahan sosial, dan pragmatisme politik. Dalam kondisi demikian, restorasi tujuan tidak dimaknai sebagai usaha mengembalikan organisasi secara literal ke masa lalu, tetapi sebagai proses meneguhkan kembali orientasi dasar agar seluruh aktivitas kelembagaan memiliki arah yang konsisten. Restorasi diperlukan untuk menilai apakah pendidikan, dakwah, amal sosial, kaderisasi, dan keterlibatan organisasi dalam kehidupan kebangsaan masih bergerak dalam satu kerangka ideologis yang sama atau telah mengalami fragmentasi akibat tuntutan kelembagaan dan kepentingan yang berkembang. Dimensi politik dalam penelitian ini dipahami secara luas sebagai posisi organisasi terhadap negara, kekuasaan, kebangsaan, umat, dan kehidupan sosial, bukan hanya keterlibatan dalam politik elektoral (Ja'far, 2022).

Secara teoritis, tujuan organisasi berfungsi sebagai orientasi yang menghubungkan identitas, tindakan, dan ukuran keberhasilan kelembagaan. Tujuan tidak hanya berupa pernyataan formal (*official goals*), tetapi juga tercermin melalui program, kebijakan, dan praktik kelembagaan (*operational goals*), sehingga kesesuaian antara keduanya dapat digunakan untuk menilai konsistensi arah organisasi (Aguilera et al., 2024). Dalam konteks Al Washliyah, restorasi juga berhubungan dengan identitas organisasi yang mencakup nilai inti (*centrality*), ciri pembeda (*distinctiveness*), dan kesinambungan identitas (*continuity*) dari waktu ke waktu (Whetten, 2006). Kajian identitas organisasi menunjukkan bahwa identitas dapat mengalami reinterpretasi dan negosiasi ketika organisasi berhadapan dengan perubahan lingkungan tanpa harus kehilangan karakter inti yang membedakannya (Knorr & Hein-Pensel, 2024). Sementara itu, dinamika dan kesinambungan tujuan dapat dibaca melalui institusionalisme historis-politik yang menekankan *path dependence*, *critical juncture*, perubahan institusi, serta relasi kekuasaan sebagai faktor yang membentuk perkembangan organisasi dalam lintasan sejarah (Capoccia & Kelemen, 2007; Hall & Taylor, 1996; Sorensen, 2015). Ketiga perspektif tersebut sejalan dengan kerangka teori skripsi yang menempatkan teori tujuan organisasi, identitas organisasi, dan institusionalisme historis-politik sebagai landasan utama analisis.

Kajian terdahulu telah memberikan dasar penting untuk memahami Al Washliyah dari berbagai sudut. Relasi agama dan politik telah dikaji dengan menunjukkan bahwa Al Washliyah bukan partai politik, tetapi tidak dapat dipisahkan sepenuhnya dari kehidupan politik karena memiliki orientasi tertentu dalam hubungan agama, negara, dan kebangsaan (Ja'far, 2022). Kajian sejarah mengenai periode 1930–1950 memperlihatkan kontribusi organisasi melalui konsolidasi, dakwah, perluasan cabang, dan keterlibatan dalam perjuangan kebangsaan, tetapi fokusnya masih terbatas pada fase sebelum dan sekitar kemerdekaan (Saragih, 2016). Studi mengenai gerakan pendidikan juga menunjukkan kuatnya komitmen Al Washliyah terhadap pendidikan Islam dan pemeliharaan tradisi Sunni, meskipun pembahasannya terutama berpusat pada satu bidang amal usaha (Siddik & Rosnita, 2014).

Kajian lain menunjukkan perpaduan orientasi religius dan nasionalis dalam pemikiran politik tokoh Al Washliyah ketika merespons kolonialisme dan

perkembangan politik Indonesia (M. I. Harahap, 2021). Penelitian mengenai Universitas Al Washliyah pada era 1950-an memperlihatkan bahwa lembaga pendidikan tinggi digunakan untuk membangun identitas keislaman sekaligus kebangsaan serta memperkuat institusionalisasi organisasi setelah kemerdekaan (Riza, 2021). Sementara itu, perkembangan dakwah Al Washliyah menunjukkan bahwa aktivitas keagamaan organisasi tetap berkaitan dengan pendidikan dan pembinaan sosial masyarakat (M. H. Harahap & Suparto, 2025). Temuan-temuan tersebut memperkaya pemahaman mengenai kontribusi Al Washliyah dalam bidang politik, pendidikan, nasionalisme, dakwah, dan kelembagaan, tetapi masih cenderung membahas dimensi-dimensi tersebut secara terpisah berdasarkan bidang, periode, lembaga, atau tokoh tertentu.

Celah penelitian tersebut menunjukkan bahwa tujuan organisasi belum banyak ditempatkan sebagai pusat analisis yang menghubungkan ideologi, pendidikan, dakwah, kaderisasi, identitas, dan orientasi politik Al Washliyah. Perubahan konteks dari kolonialisme, kemerdekaan, pergantian rezim politik, hingga perkembangan masyarakat modern menimbulkan kebutuhan untuk memahami apakah tujuan dasar organisasi mengalami perubahan, kesinambungan, penyesuaian, atau peneguhan kembali. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan konsep restorasi sebagai kerangka untuk membaca hubungan antara akar historis dan dinamika politik organisasi secara terpadu. Restorasi tidak ditempatkan sebagai romantisasi sejarah, melainkan sebagai upaya kritis untuk mengidentifikasi nilai yang perlu dipertahankan, bentuk penyesuaian yang diperlukan, serta batas antara adaptasi strategis dengan pergeseran orientasi organisasi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi historis tujuan Al Jam'iyatul Washliyah, mengidentifikasi faktor-faktor politik yang memengaruhi dinamika tujuan organisasi, serta mendeskripsikan pandangan pimpinan, tokoh, senior, alumni, dan kader terhadap restorasi tujuan Al Washliyah. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik bagi kajian organisasi Islam dan pemikiran politik Islam dengan menjelaskan hubungan antara tujuan organisasi, identitas, sejarah, dan adaptasi politik. Secara praktis, kajian ini dapat menjadi bahan refleksi bagi Al Washliyah dalam memperkuat arah perjuangan, kaderisasi, tata kelola, independensi, serta kemampuan organisasi merespons perubahan sosial dan politik tanpa kehilangan karakter keislaman dan orientasi kebangsaannya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam restorasi tujuan Al Jam'iyatul Washliyah berdasarkan pengalaman, pandangan, serta keterlibatan pihak-pihak yang mengetahui perjalanan organisasi dalam konteks sejarah dan politik (Creswell, 2015). Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri peristiwa, aktor, konteks, kesinambungan, dan perubahan yang membentuk perkembangan organisasi dari waktu ke waktu (Rambe & Samosir, 2026). Subjek penelitian terdiri atas pimpinan, tokoh, senior, alumni, dan kader yang memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan dalam Al Washliyah. Penelitian menempatkan peneliti sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan, interpretasi, dan analisis data lapangan.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder bersumber dari buku, arsip, artikel jurnal, dokumen resmi organisasi, serta dokumen lain yang relevan dengan sejarah, tujuan, identitas, dan dinamika politik Al Washliyah. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Observasi dilakukan pada lingkungan organisasi, khususnya Sekretariat Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah Al Washliyah di Sumatera Utara, untuk memperoleh data empiris mengenai kondisi dan aktivitas organisasi. Observasi dalam penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh gambaran langsung mengenai fenomena yang berlangsung dalam konteks alamiahnya (Hasanah, 2017). Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh informasi mengenai konstruksi historis tujuan, perubahan dan penyesuaian organisasi, faktor politik yang memengaruhi perkembangannya, serta pandangan informan terhadap restorasi tujuan Al Washliyah. Dokumentasi dan studi kepustakaan digunakan untuk menelusuri dokumen organisasi, arsip, dan literatur akademik yang mendukung interpretasi data lapangan.

Data dianalisis secara deskriptif melalui tiga tahap, yaitu reduksi atau kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, data hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan diseleksi serta dikelompokkan berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian. Data kemudian disajikan secara naratif untuk mengidentifikasi pola yang berkaitan dengan konstruksi tujuan Al Washliyah, faktor sejarah-politik yang memengaruhi dinamika organisasi, serta pandangan informan terhadap restorasi tujuan. Tahap terakhir dilakukan melalui interpretasi dan penarikan kesimpulan terhadap pola yang muncul dari keseluruhan data (Moleong, 2014). Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari wawancara, observasi, dokumen, arsip, dan informan dengan latar keterlibatan berbeda. Triangulasi dilakukan agar hasil penelitian tidak bertumpu pada satu sumber informasi dan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Historis Tujuan Al Washliyah dan Kesenambungan Identitas Organisasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi tujuan Al Jam'iyatul Washliyah terbentuk melalui hubungan antara nilai keislaman, kebutuhan umat, dan perubahan lingkungan sosial-politik yang mengiringi perjalanan organisasi. Al Washliyah lahir pada 30 November 1930 di Medan dalam situasi kolonial yang ditandai perpecahan umat akibat perbedaan pemahaman keagamaan antara kelompok Kaum Tua dan Kaum Muda serta politik divide et impera. Dalam konteks tersebut, nama Al Washliyah yang berarti menghubungkan atau mempersatukan merepresentasikan orientasi awal organisasi sebagai wadah pemersatu umat melalui pendidikan, dakwah, dan amal sosial. Temuan ini menguatkan kajian yang menempatkan kelahiran Al Washliyah dalam hubungan erat dengan tradisi pendidikan Islam, perkembangan intelektual Muslim Sumatera Timur, dan kebutuhan konsolidasi umat pada masa kolonial (Asari & Tanjung, 2019; Ja'far, 2020; Nisa & Harahap, 2023).

Temuan wawancara memperlihatkan bahwa tujuan awal tersebut masih dipahami sebagai fondasi identitas organisasi. Kekhawatiran pelajar dan ulama muda

pada 1930 terhadap perpecahan umat dipahami sebagai faktor penting lahirnya gerakan pendidikan, dakwah, dan penyantunan kelompok dhuafa (M. Hatta, personal communication, 2026). Pandangan tersebut sesuai dengan penjelasan Mohammad Hatta, salah satu alumni dan mantan anggota PW Al Washliyah Sumatera Utara, yang menempatkan persatuan umat dan pelayanan sosial sebagai bagian dari tujuan awal organisasi.

Kesinambungan tujuan tersebut juga ditegaskan oleh Saiful Akhyar Lubis. Menurut pandangannya, tujuan dasar tidak semestinya berubah, sedangkan program, orientasi operasional, dan fokus pengabdian dapat menyesuaikan perkembangan zaman (S. A. Lubis, personal communication, 2026). Temuan ini menunjukkan perbedaan antara tujuan dasar dengan instrumen pencapaiannya. Secara teoritis, keselarasan antara tujuan formal dan implementasi operasional diperlukan agar perkembangan program tidak menyebabkan organisasi kehilangan orientasi pokoknya (Aguilera et al., 2024). Pandangan tersebut secara eksplisit menegaskan bahwa yang berubah adalah program, orientasi, dan fokus sesuai dengan perkembangan zaman.

Perjalanan sejarah memperlihatkan pola adaptasi tersebut. Pada periode 1930–1945, orientasi Al Washliyah berpusat pada persatuan umat, pendidikan Islam, dakwah, kaderisasi intelektual Muslim, dan penguatan kehidupan sosial-keagamaan. Memasuki masa kemerdekaan, cakupan tersebut berkembang dengan memasukkan nasionalisme, pembelaan terhadap kemerdekaan, pembangunan bangsa, dan hubungan antara umat Islam dengan negara. Partisipasi tersebut menunjukkan bahwa nilai keislaman dan nasionalisme tidak diposisikan sebagai orientasi yang bertentangan, tetapi sebagai bagian yang saling melengkapi dalam pengabdian organisasi (M. I. Harahap, 2021; Riza, 2021; Saragih, 2016). Aktivitas dakwah Al Washliyah juga tetap menjadi salah satu sarana pembinaan kehidupan masyarakat (M. H. Harahap & Suparto, 2025). Periodisasi temuan penelitian menunjukkan perluasan orientasi dari persatuan dan perjuangan keislaman menuju nasionalisme dan politik kebangsaan, kemudian adaptasi kelembagaan pada Orde Baru, dan peneguhan kembali nilai dasar pada masa Reformasi.

Pada masa Orde Baru, terbatasnya ruang partisipasi politik organisasi masyarakat mendorong Al Washliyah menguatkan pendidikan, dakwah, kaderisasi, amal sosial, dan pengembangan institusi. Orientasi organisasi menjadi lebih adaptif terhadap kekuasaan agar aktivitas kelembagaan tetap berjalan tanpa kehilangan identitas keislamannya. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perubahan lingkungan politik dapat mengubah strategi tanpa harus mengubah nilai dasar organisasi (Ja'far et al., 2025). Memasuki era Reformasi, keterbukaan demokrasi memperluas ruang pengabdian Al Washliyah dalam pemberdayaan masyarakat, kehidupan demokrasi, moderasi beragama, persatuan nasional, dan fungsi moral terhadap kehidupan publik.

Kesinambungan tersebut dapat dijelaskan melalui teori identitas organisasi. Identitas dibangun oleh nilai yang dianggap inti, karakter yang membedakan organisasi, dan kesinambungan nilai dari waktu ke waktu (*centrality, distinctiveness, dan continuity*) (Whetten, 2006). Kajian identitas organisasi juga menunjukkan bahwa identitas dapat mengalami reinterpretasi ketika organisasi menyesuaikan diri dengan lingkungan tanpa kehilangan karakter intinya (Knorr & Hein-Pensel, 2024). Dalam

konteks Al Washliyah, unsur tersebut tercermin dalam pendidikan, dakwah, persatuan umat, tradisi keislaman, moderasi, dan pengabdian sosial.

Temuan tersebut diperkuat oleh pandangan Firmansyah, yang menempatkan karakter Wasathiyah bersama Shibghah, Wjihah, dan Khittah sebagai identitas utama perjuangan Al Washliyah (Firmansyah, personal communication, 2026). Shibghah berhubungan dengan karakter kader, Wjihah menunjukkan orientasi perjuangan berdasarkan nilai Islam, sedangkan Khittah menjadi pedoman strategis untuk mempertahankan independensi organisasi. Ketiga konsep tersebut tidak cukup berhenti sebagai dokumen organisasi, tetapi perlu menjadi nilai hidup dalam kaderisasi dan kepemimpinan.

Dengan demikian, restorasi dalam perspektif sejarah bukan usaha mengembalikan Al Washliyah secara literal kepada kondisi 1930. Restorasi lebih tepat dipahami sebagai proses mempertahankan nilai pokok yang menjadi identitas organisasi sambil memperbaiki bentuk implementasinya. Pengembangan ekonomi syariah, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, teknologi, dan bentuk pelayanan sosial baru tidak bertentangan dengan tujuan awal selama tetap ditempatkan sebagai instrumen pengabdian kepada umat. Temuan tersebut menunjukkan adanya kesinambungan antara identitas historis dan adaptasi kelembagaan.

Dinamika Politik dan Restorasi Tujuan Al Washliyah

Temuan penelitian menunjukkan bahwa dinamika tujuan Al Washliyah dipengaruhi oleh perubahan struktur politik sejak masa kolonial hingga Reformasi. Kolonialisme tidak hanya menjadi latar belakang berdirinya organisasi, tetapi juga membentuk orientasi persatuan, pendidikan, dakwah, dan penguatan umat. Perjuangan kemerdekaan kemudian memperluas orientasi tersebut dengan memasukkan dimensi nasionalisme dan tanggung jawab kebangsaan. Setelah kemerdekaan, pergantian sistem politik dari Demokrasi Parlemen, Demokrasi Terpimpin, Orde Baru, hingga Reformasi terus memengaruhi cara organisasi menentukan strategi dan ruang pengabdian. Namun, perubahan tersebut lebih banyak memengaruhi metode perjuangan dibandingkan tujuan dasarnya.

Fenomena tersebut sesuai dengan institusionalisme historis yang menjelaskan bahwa pilihan dan pengalaman pada periode sebelumnya dapat membentuk jalur perkembangan organisasi (*path dependence*), sedangkan momentum politik tertentu dapat menjadi titik penting (*critical juncture*) yang mendorong penyesuaian institusional (Capoccia & Kelemen, 2007; Hall & Taylor, 1996; Sorensen, 2015). Pengalaman kolonial membentuk Al Washliyah sebagai organisasi pemersatu, pengalaman kemerdekaan memperkuat dimensi nasionalisme, kebijakan Orde Baru mendorong konsolidasi melalui pendidikan dan dakwah, sedangkan Reformasi membuka ruang lebih luas bagi peran sosial-politik organisasi. Dengan demikian, sejarah bukan sekadar latar, tetapi ikut membentuk pilihan strategis organisasi.

Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan keputusan Mukhtar juga menjadi bagian dari proses tersebut. Perubahan redaksi tujuan dari waktu ke waktu menunjukkan penyesuaian terhadap perkembangan sosial-politik dan kebutuhan umat. Namun, substansi pendidikan, dakwah, amal sosial, persatuan umat, dan pembinaan kehidupan kebangsaan relatif dipertahankan. Perubahan tersebut karena itu lebih menggambarkan penyempurnaan implementasi daripada perubahan terhadap identitas dan tujuan pokok organisasi.

Dalam perspektif politik kontemporer, independensi muncul sebagai salah satu temuan paling kuat. Pandangan Abdul Hafiz Harahap menegaskan bahwa Al Washliyah tidak berada di bawah naungan partai politik, tetapi harus memiliki kesadaran politik agar tidak mudah dipolitikkan (A. H. Harahap, personal communication, 2026). Sikap tersebut menunjukkan bahwa independensi tidak identik dengan apatisisme politik. Organisasi tetap dapat memberikan kritik, rekomendasi, pendidikan politik, dan kontribusi kebangsaan tanpa menjadikan kepentingan elektoral sebagai orientasi kelembagaan. Dalam penelitian, penguatan integritas Khittah, independensi, kepemimpinan, dan kaderisasi juga dipandang sebagai bagian penting dari proses restorasi.

Pandangan tersebut sejalan dengan Arifinsyah, yang menekankan bahwa politik Al Washliyah perlu diarahkan kembali pada politik keumatan yang mandiri, berwibawa, dan tidak mudah dipengaruhi kepentingan pragmatis (Arifinsyah, personal communication, 2026). Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa restorasi tujuan tidak menuntut organisasi meninggalkan politik, tetapi menata ulang hubungan dengan politik agar tetap berada dalam koridor kepentingan umat dan kebangsaan. Sikap independen memungkinkan Al Washliyah tetap menjadi kekuatan moral tanpa berubah menjadi alat politik praktis.

Restorasi politik karena itu diarahkan pada peneguhan Khittah organisasi. Jika pada masa kolonial tantangan utama berkaitan dengan penjajahan, diskriminasi, dan politik pecah belah, tantangan kontemporer lebih banyak berupa pragmatisme politik, polarisasi masyarakat, kompetisi kepentingan, dan upaya menarik organisasi ke dalam politik elektoral. Kondisi ini menuntut literasi politik kader agar keterlibatan individual dalam politik tidak menggeser orientasi kelembagaan. Kader tetap memiliki hak berpartisipasi sebagai warga negara, tetapi nama dan kepentingan organisasi tidak seharusnya digunakan untuk kepentingan politik individual.

Dalam konteks tersebut, fungsi politik Al Washliyah lebih tepat diarahkan sebagai moral force dan kekuatan masyarakat yang memberikan gagasan, mengawal kebijakan publik, membentuk sumber daya manusia, serta membangun kemitraan dengan negara dan masyarakat. Dakwah dalam kerangka kebangsaan menunjukkan bahwa nilai keislaman dapat berkontribusi pada penguatan kehidupan nasional tanpa kehilangan orientasi agamanya (Adnan, 2021). Dengan demikian, restorasi politik bukan berarti menjauhkan Al Washliyah dari kehidupan politik, tetapi memperjelas batas antara politik kebangsaan yang berorientasi pada kemaslahatan umat dan politik praktis yang berorientasi pada kepentingan partisan.

Pandangan Pimpinan, Tokoh, Alumni, dan Kader terhadap Restorasi Tujuan

Wawancara terhadap tujuh informan yang mewakili pimpinan, tokoh, alumni, senior, dan kader memperlihatkan pola pandangan yang relatif konsisten. Ketujuh informan tersebut adalah Saiful Akhyar Lubis, Firmansyah, Mohammad Hatta, Arifinsyah, Abdul Hafiz Harahap, Dedi Iskandar Batubara, dan Fikri Ahmadi. Perbedaan usia, jabatan, dan generasi tidak menghasilkan perbedaan mendasar mengenai substansi restorasi. Para informan umumnya memahami restorasi sebagai proses peneguhan kembali nilai dasar, bukan perubahan terhadap tujuan organisasi.

Pandangan Saiful Akhyar Lubis menempatkan sejarah sebagai akar organisasi yang harus terus dipelihara. Perubahan program dan generasi dapat terjadi, tetapi sejarah berdirinya Al Washliyah pada 1930 harus terus disosialisasikan dalam proses

kaderisasi (S. A. Lubis, personal communication, 2026). Pandangan ini memperlihatkan bahwa memori organisasi memiliki fungsi penting dalam menjaga kontinuitas identitas dan mencegah keterputusan antara generasi baru dengan nilai pendirian organisasi.

Pandangan Firmansyah menekankan perlunya pembaruan secara berkesinambungan terhadap penghayatan Shibghah, Wjihah, dan Khittah. Pembaruan tidak berarti mengganti nilai tersebut, tetapi memastikan bahwa nilai dasar tetap hidup dan relevan menghadapi perkembangan zaman (Firmansyah, personal communication, 2026). Hal ini menunjukkan bahwa restorasi mengandung dimensi kontinuitas sekaligus adaptasi, yaitu mempertahankan substansi sambil memperbaiki cara penghayatan dan implementasinya.

Pandangan Mohammad Hatta menempatkan restorasi sebagai proses menguatkan kembali cita-cita pendiri melalui kaderisasi, pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan ekonomi umat. Keberhasilan restorasi tidak cukup diukur dari besarnya organisasi, tetapi dari kemampuan warga Al Washliyah memahami dan mengaktualisasikan tujuan tersebut dalam menjawab persoalan masyarakat modern (M. Hatta, personal communication, 2026). Pandangan ini memperlihatkan bahwa restorasi perlu diterjemahkan dalam tindakan organisasi, bukan hanya dalam rumusan normatif.

Pandangan Arifinsyah menegaskan dua unsur penting, yaitu sejarah sebagai pedoman kader dan posisi politik sebagai kekuatan moral. Al Washliyah perlu berkontribusi terhadap kehidupan bangsa melalui pembinaan kader, penguatan nilai Islam, persatuan, dan kebangsaan tanpa terjebak dalam politik praktis (Arifinsyah, personal communication, 2026). Keberhasilan restorasi dipandang berkaitan erat dengan penguatan kaderisasi, pendidikan, dan dakwah agar nilai perjuangan tetap relevan di setiap zaman.

Pandangan Abdul Hafiz Harahap menekankan dimensi tata kelola dan kebutuhan masyarakat. Restorasi tidak cukup menjadi wacana, tetapi harus diwujudkan dalam program pendidikan, pelayanan sosial, pemberdayaan umat, kepemimpinan visioner, profesionalisme organisasi, serta kolaborasi antargenerasi (A. H. Harahap, personal communication, 2026). Dengan demikian, mempertahankan warisan sejarah tidak berarti mempertahankan bentuk kelembagaan secara statis, tetapi mengarahkannya agar mampu memberikan solusi terhadap persoalan umat dan bangsa.

Pandangan Dedi Iskandar Batubara menempatkan transformasi kelembagaan sebagai kebutuhan organisasi yang telah mendekati usia satu abad. Tantangan utamanya bukan sekadar mempertahankan eksistensi, tetapi memastikan nilai perjuangan tetap menjadi dasar dalam setiap kebijakan dan gerakan. Al Washliyah perlu beradaptasi tanpa kehilangan karakter sebagai organisasi dakwah, pendidikan, dan pengabdian umat. Dalam politik, organisasi juga dipandang perlu memperkuat fungsi sebagai interest group dan moral force melalui penyampaian gagasan, pengawalan kebijakan publik, dan kemitraan dengan pemerintah maupun masyarakat (D. I. Batubara, personal communication, 2026).

Pandangan Fikri Ahmadi mewakili perspektif generasi muda. Restorasi dipahami sebagai upaya mengaktualisasikan kembali semangat persatuan, pendidikan, dakwah, dan kaderisasi sesuai tantangan zaman. Kader muda perlu memahami sejarah, nilai, dan cita-cita pendiri, sekaligus memiliki wawasan kebangsaan, kepemimpinan,

dan etika politik yang berlandaskan nilai Islam tanpa menjadikan organisasi sebagai alat politik praktis (F. Ahmadi, personal communication, 2026). Temuan ini memperlihatkan pentingnya transformasi metode kaderisasi agar nilai historis Al Washliyah dapat diterima oleh generasi baru.

Jika ketujuh pandangan tersebut dibaca secara keseluruhan, muncul tiga dimensi utama restorasi, yaitu penguatan kesadaran sejarah dan identitas, penguatan kaderisasi dan independensi politik, serta transformasi kelembagaan yang tetap berakar pada tujuan dasar. Kesadaran sejarah menjaga kontinuitas identitas; kaderisasi memastikan pewarisan nilai; independensi politik mencegah organisasi terseret pada kepentingan partisan; sedangkan transformasi kelembagaan menjaga relevansi terhadap perubahan sosial, ekonomi, teknologi, dan kebutuhan umat.

Temuan tersebut juga mendukung teori tujuan organisasi bahwa keberlanjutan organisasi sangat dipengaruhi kesesuaian antara tujuan normatif dengan program dan tindakan aktual (Aguilera et al., 2024). Dalam perspektif identitas organisasi, inovasi tetap memungkinkan selama tidak menghilangkan nilai inti, karakter pembeda, dan kesinambungan organisasi (Knorr & Hein-Pensel, 2024; Whetten, 2006). Sementara itu, institusionalisme historis menjelaskan bahwa adaptasi Al Washliyah berlangsung di dalam jalur sejarah yang telah dibentuk oleh pengalaman kolonialisme, kemerdekaan, perubahan rezim, dan hubungan organisasi dengan negara (Capoccia & Kelemen, 2007; Hall & Taylor, 1996; Sorensen, 2015).

Secara keseluruhan, keberhasilan restorasi tujuan Al Washliyah bergantung pada kualitas sumber daya manusia, sistem kaderisasi, kepemimpinan, tata kelola organisasi, independensi politik, serta kemampuan melakukan inovasi dalam pendidikan, dakwah, ekonomi, kesehatan, sosial, dan pemanfaatan teknologi. Nilai Shibghah, Wjihah, dan Khittah perlu menjadi dasar yang menghubungkan seluruh bentuk pembaruan tersebut. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa restorasi merupakan proses berkesinambungan antara menjaga warisan sejarah dan melakukan pembaruan dalam implementasi organisasi.

Dengan demikian, restorasi tujuan Al Washliyah bukan kecenderungan kembali secara romantis kepada masa lalu, tetapi merupakan proses menghubungkan warisan historis dengan kebutuhan kontemporer. Pendidikan, dakwah, amal sosial, persatuan umat, kaderisasi, dan pengabdian kebangsaan tetap menjadi fondasi, sedangkan program dan strategi dapat berkembang sesuai tuntutan zaman. Temuan utama penelitian ini menegaskan bahwa restorasi bukan perubahan tujuan, melainkan peneguhan identitas dan pembaruan cara mewujudkan tujuan tersebut.

SIMPULAN

Restorasi tujuan Al Jam'iyatul Washliyah dalam perspektif sejarah dan politik merupakan proses peneguhan kembali nilai-nilai dasar organisasi yang telah dibentuk sejak berdiri pada 30 November 1930. Tujuan utama berupa pendidikan, dakwah, amal sosial, persatuan umat, dan pengabdian kebangsaan tetap menjadi orientasi perjuangan organisasi hingga saat ini. Restorasi tidak dimaknai sebagai perubahan terhadap tujuan dasar, melainkan sebagai aktualisasi kembali semangat para pendiri melalui penguatan identitas organisasi, kaderisasi, serta internalisasi nilai Wasathiyah, Shibghah, Wjihah, dan Khittah. Dinamika sejarah dan politik, perubahan sistem pemerintahan, perkembangan sosial, globalisasi, kemajuan teknologi, serta tantangan pragmatisme politik mendorong Al Washliyah melakukan penyesuaian terhadap

program, strategi, dan bidang pengabdian tanpa mengubah orientasi dasarnya. Dengan demikian, perubahan yang terjadi lebih bersifat adaptasi metode perjuangan daripada pergeseran identitas organisasi.

Pandangan pimpinan, tokoh, senior, alumni, dan kader menunjukkan adanya kesamaan pemahaman bahwa keberhasilan restorasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia, kepemimpinan, kaderisasi, tata kelola organisasi, dan kemampuan mempertahankan independensi dari kepentingan politik praktis. Al Washliyah perlu tetap berperan sebagai kekuatan moral yang mampu berkontribusi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa kehilangan karakter keislaman dan jati diri organisasinya. Oleh karena itu, restorasi tujuan bukan merupakan upaya mengembalikan organisasi secara literal ke masa lalu, melainkan menjaga kesinambungan antara warisan historis dan kebutuhan kontemporer melalui pembaruan yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Temuan ini menegaskan bahwa relevansi Al Washliyah pada masa depan ditentukan oleh kemampuannya mempertahankan nilai inti sambil terus memperbarui cara perjuangannya sesuai perkembangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, A. (2021). Memaknai Dakwah Keindonesiaan dan Nasionalisme. *El-Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi*, 32(2), 40–54.
- Aguilera, R. V., De Massis, A., Fini, R., & Vismara, S. (2024). Organizational Goals, Outcomes, and the Assessment of Performance: Reconceptualizing Success in Management Studies. *Journal of Management Studies*, 61(1), 1–36. <https://doi.org/10.1111/joms.12994>
- Araminta, L. D. W., & Dinutanayo, W. W. (2025). Examining the Roles of Education Civil Society Organizations in Supporting Tertiary Enrollment in Indonesia: A Case Study of the Suryanara Foundation. *Muslim Education Review*, 4(2), 266–294. <https://doi.org/10.56529/mer.v4i2.522>
- Asari, H., & Tanjung, M. (2019). History of Maktab Al-Islamiyah Tapanuli. *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage*, 8(2), 297–334. <https://doi.org/10.31291/hn.v8i2.559>
- Capoccia, G., & Kelemen, R. D. (2007). The Study of Critical Junctures: Theory, Narrative, and Counterfactuals in Historical Institutionalism. *World Politics*, 59(3), 341–369. <https://doi.org/10.1017/S0043887100020852>
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Pustaka Pelajar.
- Hall, P. A., & Taylor, R. C. R. (1996). Political Science and the Three New Institutionalisms. *Political Studies*, 44(5), 936–957. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1996.tb00343.x>
- Harahap, M. H. & Suparto. (2025). Gerakan Dakwah pada Organisasi Al-Washliyah. *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora*, 6(1), 62–74. <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v6i1.1741>
- Harahap, M. I. (2021). Nationalism and Political Thoughts of Sheikh M. Arsyad Thalib Lubis (1908–1972). *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 45(1), 42–62. <https://doi.org/10.30821/miqot.v45i1.774>
- Hasanah, H. (2017). Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial). *At-Taqqaddum*, 8(1), 21–46. <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>

- Ja'far. (2020). Ulama Mandailing Awal Abad Ke-20: Gerakan Religius dan Politik Abdurrahman Sjihab (1910–1955). *Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences*, 1(1), 1–25. <https://doi.org/10.30821/islamijah.v1i1.7155>
- Ja'far. (2022). Al Jam'iyatul Washliyah, Agama dan Politik. *Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences*, 3(1), 1–18.
- Ja'far, Hadi, T., Dewi M., N. S., Muthmainnah, & Hamzah, A. H. (2025). Al Washliyah dan Dinamika Politik Era Orde Baru. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 2126–2134. <https://doi.org/10.56832/edu.v5i2.1768>
- Knorr, K., & Hein-Pensel, F. (2024). Since Albert and Whetten: The Dissemination of Albert and Whetten's Conceptualization of Organizational Identity. *Management Review Quarterly*, 74(2), 597–625. <https://doi.org/10.1007/s11301-022-00311-7>
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, H. (2022). *Citra Al Washliyah: Histori, Moderasi dan Jihad untuk NKRI*. Centre for Al Washliyah Studies.
- Nisa, K., & Harahap, N. (2023). Al Jam'iyatul Washliyah as an Educational Institution in the North Sumatra Province: Their History, Ideology, Educational Typology, and Problems. *Jurnal Tarbiyah*, 30(2), 233–244. <https://doi.org/10.30829/tar.v30i2.3145>
- Rambe, K. B., & Samosir, T. (2026). Pendekatan Sejarah (Historis). *Jurnal Nakula: Pusat Ilmu Pendidikan, Bahasa Dan Ilmu Sosial*, 4(2), 42–50. <https://doi.org/10.61132/nakula.v4i2.2658>
- Riza, F. (2021). Islam and Nationalism: The Role of the Universitas Al Washliyah in the Era of Post Independent 1950s. *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, 5(1), 1–36. <https://doi.org/10.30821/jcims.v5i1.7971>
- Saragih, A. (2016). Kontribusi Al Jam'iyatul Washliyah terhadap Kemerdekaan Indonesia (1930–1950). *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 40(1), 142–161. <https://doi.org/10.30821/miqot.v40i1.237>
- Siddik, D. & Rosnita. (2014). Gerakan Pendidikan Al-Washliyah di Sumatera Utara. *Ulumuna*, 18(1), 59–80. <https://doi.org/10.20414/ujs.v18i1.143>
- Sorensen, A. (2015). Taking Path Dependence Seriously: An Historical Institutional Research Agenda in Planning History. *Planning Perspectives*, 30(1), 17–38. <https://doi.org/10.1080/02665433.2013.874299>
- Whetten, D. A. (2006). Albert and Whetten Revisited: Strengthening the Concept of Organizational Identity. *Journal of Management Inquiry*, 15(3), 219–234. <https://doi.org/10.1177/1056492606291200>